

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PT. TIMAH (YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2020)

IMANIAR IZMI
Yunita Maharani
Deara Shinta Lestari

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstrack- *This is an undergraduate thesis that had been developed by Imaniar Izmi, student identification number 130180047, titled in Indonesian : “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan PT. Timah (Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2020)”.* The purpose of this study is to analyze the effect of Good Corporate Governance consisting of Institutional Ownership, Board of Commissioners, Board of Independent Commissioners, Board of Directors, Audit Committee on Company Performance. The data used in this study is secondary data in the form of the company's annual financial statements of PT. Timah listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2011-2020.

The analytical method used is descriptive analysis method and multiple linear regression analysis with a quantitative approach to find the effect between the independent variable (Good Corporate Governance) and the dependent variable (Company Performance). The hypotheses in this study were tested and analyzed with the help of the JASP 0.14.1 University of Amsterdam program

The results of the study show that institutional ownership has a partial or partial effect on the company's performance, while the Board of Commissioners, the Board of Independent Commissioners, the Board of Directors, and the Audit Committee have no partial or simultaneous influence.

Keywords: *Good Corporate Governance, Company Performance*

I. PENDAHULUAN

Sejarah lahirnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) bermula dari ancaman terhadap kepentingan pemegang saham Amerika pada tahun 1980-an. Amerika Serikat sedang mengalami pergolakan ekonomi besar-besaran pada saat itu, yang menyebabkan restrukturisasi banyak public r dan berbagai cara untuk mendapatkan kembali kendali atas yang lain. Langkah tersebut telah memicu ketidakpuasan yang kuat dari warga atau masyarakat, yang merasa bahwa manajemen mengabaikan kepentingan pemegang dalam mengelola public r. Merger dan akuisisi pada 1980-an merugikan pemegang saham karena kesalahan

manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka menjaga hak-hak pemegang saham, konsep pemberdayaan anggota komite sejak saat itu menjadi salah satu pembahasan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Corporate Governance diperkenalkan pertama kali oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. *Corporate Governance* semakin berkembang ketika beberapa peristiwa ekonomi penting terjadi. Seperti krisis keuangan Asia pada tahun 1997, dilanjut dengan kejatuhan perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom tahun 2002, serta krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat pada tahun 2008.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai hubungan yang erat dan cepat antara public perusahaan, pemegang saham, dan berbagai peristiwa yang memiliki hobi di dalam perusahaan. Tata Kelola Perusahaan membutuhkan kehidupan bentuk alat untuk mendapatkan keinginan dan memanipulasi kinerja. Tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan insentif bagi pelaku dan public internal untuk mendapatkan keinginan yang berada di dalam hobi perusahaan dan pemegang saham perlu memfasilitasi pengawasan yang kuat cara yang baik untuk menginspirasi organisasi untuk menggunakan public secara lebih efisien (*Organization for Economic Cooperation and Development*).

Good Corporate Governance mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1997 pada saat terjadi krisis ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan krisis dengan menerapkan praktik *Good Corporate Governance* pada perusahaan di Indonesia. Pada masa persaingan global yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut harus mampu bersaing secara sehat dan professional. Perusahaan harus memiliki strategi untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha. Pengelolaan perusahaan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* yang baik dan benar, pasti akan memberikan dampak yang signifikan bagi

perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam kinerja perusahaan merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global (Suryanto & Refianto, 2019).

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mematuhi penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan PT. Timah telah mengembangkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik yang diterapkan secara konsisten sehingga semua nilai yang dimiliki dengan pemangku kepentingan perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mengarah pada model hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara sistematis dan konsisten merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mendorong perkembangan bisnis, akuntabilitas, dan nilai pemegang saham jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan tata kelola perusahaan didasarkan pada teori keagenan, yang menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemilik. Manajemen sebagai agen bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak (<https://timah.com>)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan PT. Timah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2020.

II. LANDASAN TEORI

1. Akuntansi

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukan penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya bila dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan (Hamonangan S, 2020).

Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak yang berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik” (Susilowati, 2016)

2. Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu.

Akuntansi biaya merupakan salah satu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi dalam prosesnya menghasilkan barang atau jasa (Sri Mulyati, 2017).

Pencatatan biaya ini juga berisikan penafsiran terhadap metode penggolongan dan peringkasan yang dipakai dalam akuntansi biaya. Perlu diketahui bahwa metode atau pendekatan yang biasa digunakan dalam akuntansi biaya adalah pendekatan biaya standar (*standard costing*), biaya berdasarkan kegiatan (*activity-based costing*), serta biaya berdasarkan hasil (*cost-volume profit/CVP*).

1. Akuntansi biaya bertujuan untuk menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen, agar mempermudah mereka dalam mengelola keuangan perusahaan.
2. Mengendalikan biaya perusahaan, contohnya diawali dengan menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan produksi terhadap satuan produk maupun jasa.
3. Menentukan harga pokok suatu produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, dengan melihat ringkasan seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi yang juga menjadi biaya historis perusahaan. Akuntansi biaya merupakan dokumen yang valid lantaran proses perancangannya berlandaskan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang masih berlaku.
4. Menghasilkan informasi bagi manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa di kemudian hari (Sri Mulyati, 2017).

Agency Theory

Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*Agency problem*). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (*manager*) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Dimungkinkan pengelola tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (*public r interest*). Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manajer (*agent*) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang. Dengan adanya GCG, tentunya dapat menjadi alat untuk memotivasi manajer agar mampu memaksimalkan nilai pemegang saham (Fajri, 2018).

Adapun Sub Variabel Independen yang diteliti sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional

Merupakan kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan oleh lembaga keuangan non bank atau institusi, yang mengelola dana atas orang lain. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga *agency cost* yang terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga semakin meningkat. Kepemilikan institusional diproksikan dengan jumlah institusional, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah saham yang beredar (Sholekah, 2014).

2. Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 mengemukakan bahwa “dewan komisaris (dewan pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi”.

Menurut Bukhori (2012:29) mengemukakan bahwa “dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG”.

3. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

4. Dewan Direksi

Menurut Wallace dan Zinkin (2005:114) mengemukakan bahwa Direksi merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya memberi keputusan, bersama-sama dengan anggota dewan direksi lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dewan Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasi, dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif.

5. Komite Audit

Merupakan organ pendukung yang berada di bawah dewan komisaris. Komite ini dibentuk untuk membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sesuai dengan prinsip GCG. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

3. Akuntansi Keuangan Lanjutan

Akuntansi keuangan lanjutan merupakan publikasi utama mengenai penyusunan laporan keuangan

konsolidasi, sebagai implikasi atas kepemilikan dan pengendalian yang timbul dari investasi perusahaan pada publik ren ekuitas.

Persekutuan (*Partnership*) adalah suatu penggabungan diantara dua orang (badan) atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Didalam persekutuan pemisahan pemilik dan manajemen publik tidak ada, namun demikian penyelenggaraan akuntansi harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh prinsip-prinsip yang lazim. Dari segi akuntansinya, persekutuan sebagai suatu unit usaha harus dianggap mempunyai kedudukan terpisah dengan para pemiliknya (Ulfa Nurhayati, 2020).

Karakteristik Persekutuan Secara umum ada 5 yang menjadi karakteristik persekutuan yaitu:

1. Berusaha Bersama-sama (*Mutual Agency*) Setiap anggota merupakan agen dari pada persekutuan untuk mencapai tujuan usahanya
2. Jangka waktu terbatas (*Limited life*) Persekutuan tetap ada selama orang-orang (badan-badan) yang mengadakan persekutuan itu ada dan masing-masing masih tetap menghendaknya. Setiap perubahan yang berhubungan dengan maksud mengakhiri perjanjian dari para anggota berarti membubarkan persekutuan. Penarikan modal atau kaitan seorang anggota otomatis membubarkan persekutuan.
3. Tanggung jawab tidak terbatas (*Unlimited Liability*) Tanggung jawab seorang anggota terbatas pada jumlah yang ditanam di dalam usaha persekutuan. Apabila di dalam keadaan tertentu persekutuan tidak dapat membayar hutang-hutangnya karena jumlah kekayaan tidak cukup, maka kreditur berhak menagih pada salah satu seorang dari anggota persekutuan tersebut.
4. Memiliki suatu bagian/hak di dalam persekutuan (*Ownership of an Interest in a Partnership*) Kekayaan yang ditanam di dalam perusahaan tidak lebih dari hak milik yang terpisah dari anggota yang menjadi kekayaan persekutuan. Anggota yang menanamkan kekayaan ke dalam persekutuan berarti menyerahkan haknya untuk mengusahakan dan menggunakan kekayaannya itu, dan sepenuhnya rela untuk dipakai guna mencapai tujuan-tujuan persekutuan. Hak yang diberikan kepada persekutuan ini memberikan hak yang sama dengan anggota lainnya untuk memimpin dan menjalankan usaha persekutuan.
5. Pengembalian bagian keuntungan persekutuan Setiap anggota mendapat bagian dari keuntungan persekutuan. Suatu persetujuan yang dibuat untuk membagi keuntungan itu sendiri, tidak merupakan suatu bentuk persekutuan.

4. Good Corporate Governance

OECD melihat *Corporate Governance* sebagai suatu publik yang mana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate Governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab

dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya, struktur dari *Corporate Governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemuatan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Garis besar dari pemaparan diatas menjelaskan definisi GCG atau *Good Corporate Governance* yaitu bentuk tata kelola atau penerapan kebijakan perusahaan yang diterapkan untuk ditunjukkan keberlangsungan perusahaan dengan menghubungkan pemegang Saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern.

Konsep *Good Corporate Governance* secara public ren merupakan public yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Corporate Governance memiliki 5 prinsip aturan yang harus dijalankan demi terciptanya sebuah tata kelola perusahaan yang baik yaitu :

1. *Transparency* (transparansi)

Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Perusahaan. Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh public berkaitan dengan produk dan aktivitas operasional Perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki seseorang atau satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan Perusahaan. Akuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban atas aktivitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency* (kemandirian)

Prinsip kemandirian yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara public rent tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kewajaran)

Prinsip kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Usaha Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, maka dapat diketahui tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG antara lain:

Penerapan prinsip-prinsip GCG untuk memaksimalkan nilai BUMN untuk memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga tujuan BUMN dapat dicapai.

BUMN dalam menjalankan usahanya dapat dijalankan secara *professional*, *public rent*, efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ-organ perusahaan dan setiap keputusan yang diambil dilandasi oleh nilai moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan para *stakeholder* (melindungi hak *stakeholder*) serta meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional dan iklim investasi nasional.

5. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar. Hasil dari kinerja tersebut harus dapat diukur dan menggambarkan kondisi empiris perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus akan terjamin kelangsungan hidupnya karena akan mendapat kepercayaan dari public, sehingga public akan merasa nyaman untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan perlu dilakukan penilaian kinerja. Laporan keuangan dalam hubungannya dengan kinerja sering dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan karena dengan melihat laporan keuangan dapat diukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu (Fadillah, 2017).

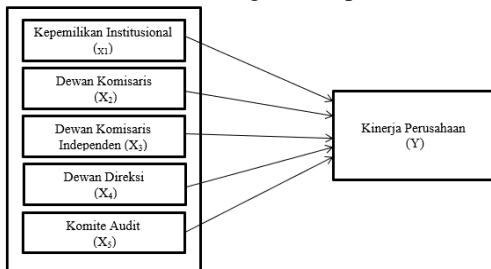
Hal ini dilakukan untuk mengetahui baik buruknya suatu perusahaan yang nantinya akan mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja perusahaan atau *companies performance* adalah suatu hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pengukuran dan penilaian kinerja keuangan saling berhubungan satu

sama lain. 7 Pengukuran kinerja (*performing measurement*) merupakan tolak ukur dari efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Kinerja merupakan hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan non *profit oriented* yang dihasilkan dalam satu periode waktu (Fahmi, 2014).

6. Kerangka Pikir

Penelitian ini secara detail untuk mengetahui dalam penerapan *Good Corporate Governance* apakah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan teori keagenan (*Agency Theory*). Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan agent. Principal yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada agent sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai *agent* bertanggung jawab secara moral dan professional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan.

Gambar II.1
Kerangka Berpikir



7. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. H₁ : Diduga Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.
2. H₂ : Diduga Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.
3. H₃ : Diduga Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan
4. H₄ : Diduga Dewan Direksi memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan
5. H₅ : Diduga Komite Audit memiliki pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

III. METODOLOGI PENELITIAN

1. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang memberikan gambaran keadaan masa sekarang secara mendalam. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan usaha dasar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap

suatu masalah dan/atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013) data sekunder adalah: “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Penelitian ini mengambil objek pada PT Timah Tbk. Pangkalpinang. PT Timah Tbk adalah anak usaha Inalum yang bergerak dibidang pertambangan atau eksplorasi timah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengutip secara langsung dari laporan keuangan perusahaan PT. Timah dalam 10 tahun terakhir yang dipublikasikan melalui website (www.idx.co.id periode 2011-2020).

Variabel Penelitian

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel

Variabel Penelitian	Indikator	Skala
Variabel Independen	Kepemilikan Institusional $= \frac{\text{Jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor}}{\text{Total jumlah lembar saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio
	Dewan Komisaris $= \sum \text{anggota Dewan Komisaris}$	Rasio
	Dewan Komisaris Independen $= \frac{\text{Jumlah seluruh anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota Dewan Direksi}} \times 100\%$	Rasio
	Dewan Direksi $= \sum \text{anggota Dewan Direksi}$	Rasio
Variabel Dependen	Komite Audit $= \sum \text{anggota Komite Audit}$	Rasio
	Kinerja Perusahaan $= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal}} \times 100\%$	Rasio

IV. PEMBAHASAN

Hasil Analisis dan Pembahasan Analisis Deskriptif

Tabel V.1

Hasil Analisis Deskriptif

Descriptives	N	Mean	SD	SE
ROE	10	0.069	0.104	0.033
KI	10	0.558	0.088	0.028
DK	10	5.500	0.527	0.167
DKI	10	0.280	0.092	0.029
DD	10	5.400	0.699	0.221
KA	10	4.100	0.316	0.100

Sumber: Data Diolah Dengan JASP Versi 0.14.1, 2022

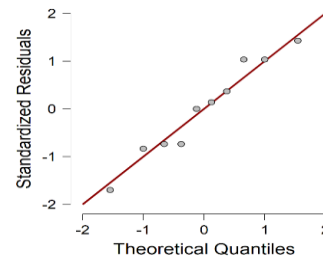
Analisis statistik deskriptif ini menggunakan total 10 data observasi dari perusahaan PT. Timah di BEI tahun 2011-2020. Dari hasil analisis deskriptif pada table diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari periode 2011-2020 ROE (Y) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.069 dan standar deviasi sebesar 0.104 (*mean* < std. deviasi) dan standar *error* nya sebesar 0.033 yang menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran data yang menyebar (heterogen), sehingga menjadi variasi nilai kinerja perusahaan yang tinggi.
2. Dilihat dari periode 2011-2020 kepemilikan institusional (X₁) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.558 dan standar deviasi sebesar 0.088 (*mean* > std. deviasi) dan standar *error* nya sebesar 0.028. yang menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran data yang mengumpul (homogen), sehingga menjadi variasi nilai kepemilikan institusional yang tinggi.
3. Dilihat dari periode 2011-2020 dewan komisaris (X₂) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5.500 dan standar deviasi sebesar 0.527 (*mean* > std. deviasi) dan standar *error* nya sebesar 0.167 yang menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran data yang mengumpul (homogen), sehingga menjadi variasi nilai dewan komisaris yang tinggi.
4. Dilihat dari periode 2011-2020 dewan komisaris independen (X₃) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.280 dan standar deviasi sebesar 0.092 (*mean* > std. deviasi) dan standar *error* nya sebesar 0.029 yang menunjukkan bahwa terdapat pola penyebaran data yang mengumpul (homogen), sehingga menjadi variasi nilai dewan komisaris independen yang tinggi.
5. Dilihat dari periode 2011-2020 dewan direksi (X₄) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5.400 dan standar deviasi sebesar 0.699 (*mean* > std. deviasi) dan standar *error* nya sebesar 0.221 yang menunjukkan bahwa sebaran data dewan direksi dalam penelitian ini kecil, yang artinya data bersifat homogen atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar.
6. Dilihat dari periode 2011-2020 komite audit (X₅) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.100 dan standar deviasi sebesar 0.316 (*mean* > std. deviasi) dan standar *error* nya sebesar 0.100 yang menunjukkan bahwa sebaran data komite audit dalam penelitian ini kecil, yang artinya data bersifat homogen atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar.

Uji Normalitas

Tabel V.2

Q.Q Plot Standardized Residual (Normalitas)



Sumber: Data Diolah Dengan JASP Versi 0.14.1, 2022

Berdasarkan keterangan grafik di atas, grafik normal plot terlihat titik menyebar disekitar garis diagonal, dan nilai residual mendekati rata-rata. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa data terstandarisasi secara normal sehingga regresi dikategorikan baik untuk digunakan dalam analisis statistik ini.

Uji multikolinearitas

Tabel V.3

Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statisti	
	Tolerance	VIF
1 (Intercept)		
KI	0.352	2.844
DK	0.540	1.852
DKI	0.395	2.533
DD	0.767	1.304
KA	0.556	1.800

Sumber: Data Diolah Dengan JASP Versi 0.14.1, 2022

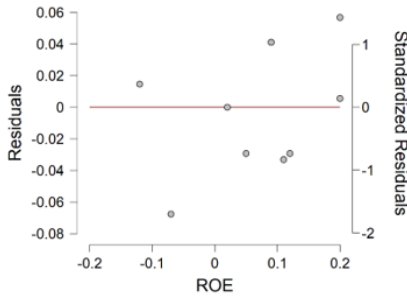
Hasil uji multikolinearitas pada tabel V.3 menunjukkan bahwa nilai tolerance yang dimiliki oleh variabel komisaris institusional sebesar 0.352, dewan komisaris sebesar 0.540, dewan komisaris independen sebesar 0.395, dewan direksi sebesar 0.767, dan komite audit sebesar 0.556. Nilai *Tolerance* yang dimiliki oleh seluruh variabel independen tersebut di atas 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama bahwa nilai VIF yang dimiliki variabel komisaris institusional sebesar 2.844, dewan komisaris sebesar 1.852, dewan komisaris independen sebesar 2.533, dewan direksi sebesar 1.304, dan komite audit sebesar 1.800. Nilai VIF yang dimiliki oleh seluruh variabel independen adalah di bawah 10. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dan model regresi ini layak untuk digunakan.

Uji Heterokedastisitas

Tabel V.4

Hasil Uji Heterokedastisitas
Residuals vs. Dependent



Sumber: Data Diolah Dengan JASP Versi 0.14.1, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* yang ditunjukkan pada tabel V.5 dapat dilihat bahwa titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang melainkan melebar tidak beraturan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Linier Berganda

Tabel V.5

Hasil Analisis Linier Berganda

Coefficients						Collinearity Statistics	
Model	Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p	Tolerance	VIF
1 (Intercept)	-1.029	0.463		-2.220	0.091		
KI	1.368	0.382	1.155	3.581	0.023	0.352	2.844
DK	0.045	0.051	0.229	0.880	0.429	0.540	1.852
DKI	0.661	0.344	0.584	1.919	0.127	0.395	2.533
DD	-0.051	0.032	-0.345	-1.580	0.189	0.767	1.304
KA	0.043	0.084	0.132	0.514	0.635	0.556	1.800

Sumber: Data Diolah Dengan JASP Versi 0.14.1, 2022

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 5 maka persamaan regresi linear berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = -1.029 + 1.368 X_1 + 0.045 X_2 + 0.661 X_3 - 0.051 X_4 + 0.043 X_5 + e$$

Berdasarkan analisis dari tabel tersebut, maka dapat diperoleh hasil

1. Konstanta sebesar -1.029 maka nilai variabel kinerja perusahaan akan tetap sebesar -

1.092 jika semua variabel independen bernilai nol.

2. Koefisien kepemilikan institusional sebesar 1.368, artinya jika nilai variabel ini ditingkatkan satu satuan maka akan menaikkan nilai variabel kinerja perusahaan sebesar 1.368 dengan variabel lain tetap.
3. Koefisien dewan komisaris sebesar 0.045, artinya jika nilai variabel ini ditingkatkan satu satuan maka akan menaikkan nilai variabel kinerja perusahaan sebesar 0.045 dengan variabel lain tetap.
4. Koefisien dewan komisaris independen sebesar 0.661, artinya jika nilai variabel ini ditingkatkan satu satuan maka akan menaikkan nilai variabel kinerja perusahaan sebesar 0.661 dengan variabel lain tetap.
5. Koefisien dewan direksi sebesar -0.051, artinya jika nilai variabel ini ditingkatkan satu satuan maka akan menurunkan nilai variabel kinerja perusahaan sebesar 0.051 dengan variabel lain tetap.
6. Koefisien komite audit sebesar 0.043, artinya jika nilai variabel ini ditingkatkan satu satuan maka akan menaikkan nilai variabel kinerja perusahaan sebesar 0.043 dengan variabel lain tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel V.6

Hasil Uji koefisien determinasi (R²)

Model Summary							
Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE	R ² Change	F Change	DfDf 1 2 P
1	0.924	0.854	0.671	0.060	0.854	4.667	5 4 0.080

Sumber: Data Diolah Dengan JASP Versi 0.14.1, 2022

Berdasarkan perhitungan diatas nilai R² sebesar 0.854 yang menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 85,4%. Hal ini berarti 85,4% pengungkapan nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit sedangkan 14,6% pengungkapan kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji T

Tabel V.7
Hasil Uji T

Coefficients					
Model	Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
1 (Intercept)	-1.029	0.463		-2.220	0.091
KI	1.368	0.382	1.155	3.581	0.023
DK	0.045	0.051	0.229	0.880	0.429
DKI	0.661	0.344	0.584	1.919	0.127
DD	-0.051	0.032	-0.345	-1.580	0.189
KA	0.043	0.084	0.132	0.514	0.635

Sumber: Data Diolah Dengan JASP Versi 0.14.1, 2022

Nilai t tabel pada nilai probabilitas sebesar 0,05 dan nilai *degree of freedom* (df) sebesar 4 (10-6) diperoleh sebesar 2.77645 (lampiran T Tabel).

Berdasarkan hasil uji parsial (uji-t) dari tabel V.7 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kepemilikan institusional (X1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja perusahaan (Y). Ini dapat dilihat dari hasil t hitung < t tabel (3.581 < 2.77645) dan nilai sig. t > tingkat signifikansi (0,02 > 0,05).
2. Variabel dewan komisaris (X2) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja perusahaan (Y). Ini dapat dilihat dari hasil t hitung < t tabel (0.880 < 2.77645) dan nilai sig. t > tingkat signifikansi (0,429 > 0,05).
3. Variabel dewan komisaris independen (X3) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja perusahaan (Y). Ini dapat dilihat dari hasil t hitung < t tabel (1.919 < 2.77645) dan nilai sig. t > tingkat signifikansi (0,127 > 0,05).
4. Variabel dewan direksi (X4) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja perusahaan (Y). Ini dapat dilihat dari hasil t hitung < t tabel (-1.580 < 2.77645) dan nilai sig. t > tingkat signifikansi (0.189 > 0,05).
5. Variabel komite audit (X5) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kinerja perusahaan (Y). Ini dapat dilihat dari hasil t hitung < t tabel (0.514 < 2.77645) dan nilai sig. t > tingkat signifikansi (0.635 > 0,05).

Uji F

Tabel V.8
Hasil Uji F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
1	Regression	0.083	5	0.017	4.667	0.080
	Residual	0.014	4	0.004		
	Total	0.097	9			

Sumber: Data Diolah Dengan JASP Versi 0.14.1, 2022

Nilai F tabel dengan nilai probabilitas sebesar 0,05, nilai *degree of freedom* untuk pembilang (N1)

sebesar 5 (k-1 = 6-1) dan *degree of freedom* untuk penyebut (N2) sebesar 4 (n-k = 10-6), diperoleh sebesar 6.26 (lampiran F Tabel).

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dijelaskan bahwa Dari table uji simultan (uji-F) di atas dapat dilihat bahwa nilai F hitung > F tabel (4.667 > 6.26) dan nilai sig. F > 0,05 (0,08 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan instirusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja perusahaan.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Terkait dengan keterbukaan informasi (transparansi) yang merupakan salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* dan sebagai komitmen perusahaan dalam mewakili kepentingan para pemegang sahamnya, perusahaan senantiasa memberikan perhatian terkait dengan informasi yang relevan atas perkembangan terkini perusahaan kepada para investor.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit terhadap kinerja perusahaan PT. Timah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2020.

1. Berdasarkan hasil T-test yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan, sedangkan dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
2. Berdasarkan hasil F-test yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan *Agency Theory* melalui kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit secara simultan tidak

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan berkaitan adanya keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen dalam mekanisme *Good Corporate Governance* seperti rapat umum pemegang saham, sekretaris perusahaan dan kepemilikan manajerial.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel dependen nilai perusahaan yang diukur dengan metode yang lain seperti *Price Earing Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV).
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel pada perusahaan maufaktur subsektor makanan dan minuman saja atau perusahaan

manufaktur yang bergerak dibidang tambang atau bisa juga menggunakan sampel dari kelompok perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian seperti memperpanjang rentang periode pengamatan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Usaha Milik Negara. “Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.” (Per—01/Mbu 2011), 2011, pp. 1–19, <http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-01/MBU/2011.pdf>.
- [2] Bukhori, I., & Raharja, R. “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2010-2013).” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, vol. 1, no. 1, 2012, pp. 263–74.
- [3] Fadillah, Adil Ridlo. “Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Di Lq45.” *Jurnal Akuntansi*, vol. 12, no. 1, 2017, pp. 37–52, <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>.
- [4] Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFPE.
- [5] Kementerian BUMN. “Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117 / M-MBU / 2012 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 4, no. 2, 2012, pp. 193–201.
- [6] Mulyati, Sri and Yunita, Nur Afni and Satria, Dy Ilham and Indrayani, Indrayani and Yusra, Muhammad (2017) *Akuntansi Biaya*. Sefa Bumi Persada. ISBN 978-602-6960-53
- [7] Siallagan, H dan Machfoedz. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi IX, 23-26.
- [8] Suryanto, A., & Refianto, R. (2019). ANALISIS PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN. *Jurnal Bina Manajemen*, 8(1).
- [9] Susilowati, L. (2016). *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*. Yogyakarta: Penerbit Kalimedia.
- [10] Ulfa Nurhayani, Choms Gary GT Sibarani & La Hanu. 2020. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020.